

Ridwan Khairandy
Hanafi Amrani
Dolly Setiawan Silitonga

KORUPSI

KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA
DI BUMN

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	109/mhk/19/C.1		
th. Angg.	2019	Cat	C.1
PARAP	<i>gfm</i>	TGL	17/07/2019



FH UII Press

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
 Bab 1 : Gambaran Sekilas Konflik Norma Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN	 1
 Bab 2 : Badan Hukum	
A. Landasan Teoritik Badan Hukum	13
B. Karakteristik Perseroan Terbatas Badan Hukum	25
 Bab 3 : Badan Usaha Milik Negara	
A. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	39
B. Tujuan Badan Usaha Milik Negara	44
C. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara	45
1. Perusahaan Perseroan (Persero)	46
2. Perusahaan Umum (Perum)	59

Bab 4 : Keuangan Negara Dan Keuangan Badan Usaha Milik Negara	73
--	-----------

Bab 5 : Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	
---	--

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	83
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	88
C. Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi	102
D. Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	111

Bab 6 : Alasan Pembenaar Dalam Perkara Korupsi Keuangan Negara: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana	
--	--

A. Doktrin <i>Bussines Judgement Rule</i>	117
B. Sifat Melawan Hukum Materiil yang Berfungsi Negatif	124

Bab 7 : Status Kekayaan Negara Pada Perseroan Dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi	
---	--

A. Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Persero	129
B. Tindakan Direksi yang Beriktikad Baik yang Menimbulkan Kerugian bagi Persero dan Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi	158

Daftar Pustaka	177
-----------------------------	------------